

PENELITIAN SKRIPSI

**TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PENCABUTAN HAK BERINTERNET**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Putusan Nomor:
96/Pid.Sus/2023/PT BTN)**



Diajukan oleh:

Nindha Ayu Pramudhita

NPM : 200513680
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENELITIAN SKRIPSI
TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PENCABUTAN HAK BERINTERNET
(Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Putusan Nomor:
96/Pid.Sus/2023/PT BTN)



Diajukan oleh:

Nindha Ayu Pramudhita

NPM : 200513680
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Pendaran

Pada Tanggal

16 November 2023

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincentius', is placed above the name of the supervisor.

Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN SKRIPSI**

**TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PENCABUTAN HAK BERINTERNET**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Putusan Nomor:
96/Pid.Sus/2023/PT BTN)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Desember 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M. Hum
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H
Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum

Tanda Tangan

()
()
()

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. FWaresia Anita Christiani. S.H., M. Hum.

SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli peneliti, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Peneliti lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 13 November 2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nindha Ayu Pramudhita".

Nindha Ayu Pramudhita

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, berkat hikmat dan kasih setianya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK BERINTERNET (Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PT BTN)”** dengan baik dan lancar, tanpa ada suatu kendala apa pun. Penelitian skripsi ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum.

Tidak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang ikut membantu dalam memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
2. Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, nasihat dan arahan selama penelitian skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing peneliti selama menempuh perkuliahan.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memudahkan peneliti selama masa perkuliahan.

5. Keluarga peneliti, mama Endang Triwahyuni dan Om Imbang Muryanto, serta kakak Maharani Putri Dewayani yang tiada hentinya senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat serta mendoakan peneliti.
6. Keluarga peneliti di Solo, Papa Darsono, Mama Puji, mbak Christava Bella Monica dan mas Alfendo Yefta Argastya yang senantiasa mendoakan, serta memberi dukungan penuh kepada peneliti.
7. Sahabat-sahabat peneliti sejak kecil, Cintya Pradnya Auricalsita dan Rachmadita Chairunisa, yang senantiasa selalu ada untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
8. Sahabat-sahabat peneliti sejak SD, Stefani Fransisca, Angelita Tyas dan Raevita Salim, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada peneliti.
9. Sahabat-sahabat peneliti di perkuliahan, Vania Hendradiarti, Crescentia Luvianney Anum Spallanzani, Tirel Maurinka, Agnes Venza Vania, Shera Melinda dan mbak Yohana Dwi Kistina yang telah menemani peneliti selama ini dalam berdiskusi, bertukar pendapat, memberikan dukungan, semangat dan doa.
10. Berbagai pihak yang secara tidak langsung turut membantu peneliti dalam proses skripsi ini.

ABSTRACT

Pandeglang District Court Decision Number 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl imposes an additional crime in the form of revocation of internet rights against the accused perpetrators of revenge porn crimes. The revocation of internet rights handed down by the Judge is an interesting thing to study because there is no applicable law or legal umbrella that regulates the revocation of internet rights as an additional crime. The purpose of this legal research is to find out and analyze the judge's consideration of the Pandeglang District Court decision Number 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl and the cancellation of the District Court decision which was later overturned by the Banten High Court Number 96/Pid.Sus/2023/PT BTN related to the right to internet freedom. The method used is a case approach by examining legal problems or issues regarding the judge's consideration (ratio decidendi) in the additional criminal conviction of internet disenfranchisement. The result of this legal research is that the consideration of the panel of judges of the District Court on the additional crime of revocation of internet rights is the result of legal construction by the Judge in Pandeglang District Court Decision Number 71 / Pid.Sus / 2023 / PN Pdl with the intention that the perpetrators of revenge porn crimes do not repeat their actions again, but the judge in imposing this additional crime needs to be guided by the legality in the laws and regulations and if by the institution The legislature wants to form a law, so rules must be made and then can be applied as procedures for implementation and supervision.

Keywords: *judge's consideration, revenge porn, revocation of internet rights, legality.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Skripsi	20
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Berinternet Dalam Tindak Pidana Revenge Porn.....	21
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	21
2. Jenis Pertimbangan Hakim	22
3. <i>Revenge Porn</i>	23

B. Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Berinternet Ditinjau Dari Hukum Pidana	23
1. Pidana Tambahan.....	23
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Berinternet.....	26
1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Berinternet Pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.....	26
2. Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN terkait Pembatalan Penjatuhan Pidana Tambahan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl	56
BAB III PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63